

ABSTRAK

Dana Desa dianggarkan setiap tahun dalam APBN untuk diserahkan kepada desa-desa di Indonesia yang menjadi salah satu sumber dari pendapatan desa. Dana Desa yang bersumber dari APBN menjadi wujud ikrar negara kepada kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai wewenang dalam merencanakan dan mengelola tugas pemerintahan, kebutuhan masyarakat desa setempat yang mengacu pada gagasan, hak, dan kewajiban desa. Pengelolaan keuangan desa dilakukan berdasarkan prinsip tata kelola yaitu transparan, akuntabel dan partisipatif. Penelitian ini dilaksanakan di desa Bejijong, kecamatan Trowulan, Mojokerto. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan dana desa di desa Bejijong sudah berjalan sesuai prinsip pengelolaan keuangan. Kegiatan dan kebijakan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik di tingkat pusat maupun daerah. Pemerintah desa Bejijong juga terbuka kepada masyarakat perihal laporan keuangan desa Bejijong dengan melakukan publikasi melalui spanduk dan melalui *website* desa Bejijong, meskipun masih terdapat laporan yang belum di publikasikan sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 28 tahun 2020. Untuk meningkatkan tingkat partisipasi masyarakat dalam perkembangan desa Bejijong, maka keterbukaan pemerintah desa menjadi hal yang penting dengan didukung peningkatan pemahaman atas peraturan yang berlaku terkait pertanggungjawaban dan publikasi keuangan desa.

Kata Kunci : *akuntabilitas, dana desa, publikasi, laporan*

ABSTRACT

Village Fund is budgeted annually in the APBN to be handed over to villages in Indonesia which are one of the sources of village income. Village funds sourced from the APBN is a statement of state pledge to legal community units that are authorized to plan and manage government tasks, and the needs of local village communities referring to village ideas, rights, and obligations. Village financial management is carried out based on governance principles, namely transparent, accountable, and participatory. This research was conducted in Bejijong village, Trowulan sub-district, Mojokerto. The results of this study indicate that the accountability of village fund management in Bejijong village has been running according to financial management principle. Activities and policies that include planning, implementation, administration, reporting, and village financial accountability have been implemented under applicable laws and regulations at both the central and regional levels. The Bejijong village government is also open to the public regarding to Bejijong village financial reports by publishing through banners and through the Bejijong village website, although there are still reports that have not been published as stated in Mojokerto Regent Regulation Number 28 of 2020. To increase the level of community participation in village development

Beijing, the openness of the village government is important, supported by an increased understanding of the applicable regulations regarding accountability and publication of village finances.

Keywords: *accountability, village funds, publications, reports*